

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang masyarakatnya memiliki watak dan karakter yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan, salah satunya adalah menimbulkan konflik sosial dan konflik politik. Konflik yang terjadi di Indonesia, seperti di Aceh, Ambon, Papua dan daerah lainnya. Penyebab konflik terjadi dilatarbelakangi oleh berbagai macam permasalahan, mulai dari kesenjangan sosial, konflik agama dan konflik antar etnis.

Masyarakat Indonesia yang multietnis, kemungkinan terjadinya konflik selalu terbuka. Peristiwa ini terjadi karena negara didirikan atas kesadaran politik, yang tidak semata-mata merasa diri sebagai etnis terjajah, tetapi karena adanya persamaan visi bersama tentang masa depan bersama dan sejahtera bersama. Di pihak lain, sejahtera bersama adalah sasaran akhir pendirian negara. Kesejahteraan bersama adalah tujuan negara sehingga sebuah negara yang tidak dapat mensejahterakan para warga negara dapat menimbulkan masalah sebagai sumber konflik.

Konflik yang terjadi akan menghasilkan dua akibat. Akibat *pertama* adalah disintegrasi. Peristiwa ini dapat menimpa negara-negara yang multietnis seperti Indonesia. Apa yang telah terjadi di Timor-Timor merupakan salah satu bukti dari kekalahan Indonesia, apapun alasan yang dikemukakan dibalik peristiwa itu. Akibat *kedua* adalah pergantian pemerintahan. Peristiwa ini biasanya terjadi pada negara-negara yang dibangun atas satu etnis tertentu, misalnya Israel. Jika terjadi konflik di negara seperti ini, yang berubah adalah sistem pemerintahan atau pemerintahannya, bukan suatu disintegrasi.

Beberapa daerah yang bahkan kini mulai menyuarakan rasa ketidakadilan setelah 70 tahun hidup bersama tidak dapat semata-mata dilihat sebagai suatu tindakan subversif, suatu makar kepada pemerintah yang sah. Justru suara itu menjadi pertanda bahwa mereka mulai menggugat visi sejahtera bersama. Keinginan membangun sebuah bangsa baru berdasarkan kelompok etnis yang

lebih kecil merupakan harapan baru manakala mereka merasa telah terjadi ketidakcocokan yang tidak dapat ditawarkan lagi antara mereka dengan negara.

Aceh merupakan salah satu Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terletak di kawasan paling ujung Pulau Sumatera Bagian Barat yang berbatasan langsung dengan Sumatera Utara. Posisi geografis yang terletak diantara Selat Malaka dan Samudera Hindia ini memiliki nilai yang sangat strategis dari sudut geografis, politik, pertahanan dan ekonomi. Aceh juga mempunyai potensi alam yang banyak seperti minyak bumi, gas alam, batu bara, kandungan emas, tembaga, dan lainnya serta mempunyai tanah yang subur sehingga cocok dengan pertanian dan perkebunan.

Sejarah besar Aceh menjadi goresan tinta emas bagi dunia, Aceh adalah kejayaan dan *tamadun* tinggi yang dibangun sejak berabad-abad lampau. Masa-masa emas dari beberapa kerajaan Islam berdaulat, seperti Kerajaan Samudera Pasai yang kemudian digantikan oleh Kerajaan Aceh Darussalam, dengan pujangga-pujangga besar dan pelabuhan-pelabuhan dagangnya yang tersohor di Selat Malaka, jalur strategis perdagangan dunia (Nazar, 2008 : 1). Oleh karena itu, Aceh menjadi salah satu incaran daerah jajahan bagi negara-negara kapitalis demi merebut dan menguasai segala potensi alam yang ada di *tanoeh rincoeng* (bumi rencong).

Aceh sejak dulunya juga dikenal sebagai daerah yang terus dilanda konflik. Pada tahun 2004 wilayah Aceh kembali menjadi perhatian dunia, seperti pernah terjadi selama beberapa tahun di tahun 1870-an. Jika orang Aceh dulunya pernah dianggap sebagai korban-korban agresi Belanda dan *realpolitik* Inggris, maka saat ini orang-orang Aceh dianggap sebagai korban-korban tak berdosa akibat tsunami yang paling ganas dalam sejarah manusia. Selain itu sejak tahun 1990-an, mereka juga telah menjadi korban bersalah atau tidak bersalah akibat perang di wilayah mereka, atas apa dan bagaimana Aceh harus tetap menjadi bagian dari Indonesia (Reid, 2005: vii).

Suku bangsa Aceh merupakan hasil pembauran beberapa bangsa pendatang dengan beberapa suku bangsa asli di Sumatera, yaitu: dari Arab, India, Parsi, Turki, Melayu, Minangkabau, Batak, Nias, Jawa dan lain-lain. Orang Aceh sendiri menyebut dirinya *Ureueng Aceh* (Orang Aceh). Asimilasi suku bangsa Aceh

dengan suku bangsa lain malah melahirkan suku bangsa baru, yaitu suku bangsa *Aneuk Jame* dan Singkil. Daerah Aceh bisa juga dijuluki Serambi Mekkah, Tanah Rencong, dan Bumi Iskandar Muda (Hidayah, 1996: 3). Suku bangsa Aceh mendiami daerah Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, dan sebagian di Kabupaten Aceh Timur, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan Aceh Barat, serta di Kotamadya Sabang dan Banda Aceh.

Pergolakan di Aceh merupakan suatu konflik berkepanjangan sejak tahun 1953 hingga tahun 1959 yang di akhiri dengan ikrar *Lam Teh*. Kemudian pergolakan muncul lagi yang dimulai tahun 1976 sampai akhirnya ditanda tangannya Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah RI dan GAM pada tanggal 15 Agustus 2005 di Helsinki. Mack (2006) dalam (Harbom & Peter Wallensteen, 2007:623) *Human Security Report 2005* memberikan penjelasan bahwa masyarakat Internasional berhasil menyelesaikan banyak konflik di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah penyelesaian konflik Aceh pada 2005 dengan ditanda tangannya MoU di Helsinki.

Konflik antara Aceh dan Pemerintahan Indonesia sudah terjadi dua kali sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu konflik Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI/TII) pada tahun 1953-1962 dan konflik GAM pada tahun 1976-2005. Namun dua konflik tersebut beda tujuan. Konflik pertama bertujuan memperoleh otonomi, sementara konflik kedua bertujuan memperoleh kemerdekaan, walaupun pada akhirnya kedua konflik ini diselesaikan melalui negosiasi yang menghasilkan satu kesepakatan dan kesepakatan damai (Schuzle, 2007); (Lahdensuo, 2007) dalam (Zainal, 2016:82).

Konflik tajam dalam mempertentangkan antara kekuasaan pusat dan kepentingan rakyat di daerah, misalnya dirasakan ketidakadilan dalam alokasi hasil kekayaan alam antara pusat dan daerah, tidak terealisasinya janji untuk menjadikan Aceh sebagai daerah otonomi dalam melaksanakan daerah Syariat Islam. Konflik di Aceh tidak pernah diberikan solusi secara tuntas dan bisa mewartakan aspirasi yang muncul dikalangan sebagian besar rakyat Aceh, sehingga efek dari akumulasi kekecewaan tersebut melahirkan gerakan separatis (Maulana, 2001: 2).

Persoalan konflik politik yang terjadi di Aceh pada masa sekarang ini merupakan persoalan internal negara Republik Indonesia, karena persepsi sebagian rakyat Aceh pihak pemerintah pusat selalu mengkhianati setiap

Rizal Fahmi, 2018

REVITALISASI NILAI-NILAI NASIONALISME PASCA KONFLIK DI MASYARAKAT ACEH BARAT DAYA
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kesepakatan yang telah dibuat (Maulana, 2001: 18). Hal tersebut dimulai dari awal kemerdekaan bahkan sampai sekarang. Bahkan lebih parah lagi kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pusat dianggap dan diyakini oleh rakyat Aceh selalu merugikan kepentingan mereka. Padahal kekayaan yang ada di Aceh selalu dieksploitasi untuk kepentingan pemerintah pusat tetapi rakyat Aceh ditindas dan selalu diimintidasi.

Salah satu kesepakatan yang telah dikhianati pemerintah pusat adalah pada tahun 1947 pada saat Teungku Muhammad Dawod Beureueh menerima janji Presiden Soekarno, kalau Indonesia merdeka akan dijadikan Negara Islam. Dengan itu beliau mengerahkan Mujahidin Aceh untuk membebaskan Indonesia dari serbuan Belanda. Namun, janji yang dikumandangkan hanya tinggal dalam kenangan. Soekarno yang berpaham Nasionalis Komunis bukan hanya sekedar tidak memenuhi janji tersebut, tetapi kemudian memimpin Indonesia dengan cara komunis anti Tuhan yang sangat dibenci Teungku Muhammad Dawod Beureueh.

Ketidakadilan yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah selama ini juga telah menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi masyarakat Aceh. Perlakuan tidak adil pemerintah pusat sampai sekarang telah berdampak luas terhadap kehidupan politik di Serambi Mekkah. Ketidakadilan selama ini telah mengakibatkan Aceh tertinggal dalam segala bidang. Kehidupan normal yang tidak bisa berjalan membuat rakyat Aceh diliputi rasa kecemasan, ketakutan, kekhawatiran akibat tidak adanya serta banyaknya kasus penculikan, pembantaian, penyiksaan, penangkapan dan penembakan. Kehidupan sosial budaya masyarakat Aceh tidak berkembang, bahkan budaya-budaya setempat tidak diberi ruang untuk tumbuh. Rakyat tidak berani mengekspresikan diri walaupun dalam kehidupan kelompok. Walaupun sebutan Daerah Istimewa masih melekat namun hampir tidak ada lagi peranan yang bisa dimainkan oleh pemuka adat dan agama. Akibatnya Aceh pada masa Orde Baru selalu dalam suasana huru-hara, kritis bahkan konflik dan malapetaka yang berkepanjangan (Sudaryanto, 2007: 43-44).

Pembunuhan massal, perampokan, pemerkosaan dan perlakuan sewenang-wenang terhadap rakyat Aceh, sehingga menyebabkan Aceh diklaim sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Perlakuan semasa DOM tahun 1989-1998 telah

menimbulkan kuburan-kuburan massal di tiga Kabupaten Pidie, Aceh Utara dan Kabupaten Aceh Timur (Chaidar, 1999:215). Ketidakadilan dalam mengelola sumber daya alam dan faktor lainnya yang juga telah menimbulkan faktor yang memicu timbulnya berbagai konflik di Aceh. Dari segi ekonomi, gejolak sosial yang terjadi di Aceh lebih banyak disebabkan pemerintah menerapkan sentralistik. Tidak adanya penimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah, telah menjadikan Aceh sebagai daerah miskin (Maulana, 2001 :19).

Perubahan tidak juga terjadi ketika ditemukan ladang gas di Arun, Aceh Utara yang kemudian diikuti dengan berdirinya industri besar seperti PT. Pupuk Iskandar Muda, PT. Asean Aceh Fertilizer (AAF), PT. Kraft Aceh dan sejumlah industri lainnya. Bila dipahami dan dipikirkan secara bijak seharusnya pemerintah layak berterima kasih kepada daerah Aceh. Pengolahan sumber daya alam di daerah lebih banyak memberikan kemakmuran kepada orang-orang luar daerah, masyarakat setempat lebih banyak jadi penonton. Rakyat Aceh menderita karena negerinya kaya, sehingga orang luar datang merampok kekayaan alam dan bumi Aceh dan menyingkirkan rakyat Aceh sebagai pemiliknya (Maulana, 2001:19). Akibat dari konflik yang terjadi banyak penduduk di Aceh yang bukan suku bangsa Aceh pergi meninggalkan Aceh, khususnya orang Jawa yang mengungsi dan meninggalkan wilayah Aceh karena tidak tahan akan intimidasi dan takut apabila terus menerus tinggal di wilayah yang dianggap rawan konflik.

Konflik yang berkepanjangan di Aceh khususnya Aceh Barat Daya membuat masyarakat memiliki rasa trauma yang berkepanjangan sehingga masyarakat mengalami gangguan mental, dampak lain yang dirasakan pasca terjadinya konflik adalah terjadinya penurunan nilai-nilai Nasionalisme masyarakat Aceh. Nurjannah (2011) konflik di beberapa daerah (Aceh, Papua, Ambon, dll) menunjukkan telah terjadinya penurunan nilai-nilai nasionalisme ditingkat lokal, meskipun hanya dikumandangkan oleh sebagian kecil masyarakat. Sehingga masyarakat Aceh masih banyak yang menyimpan rasa dendam terhadap kejahatan konflik yang dilakukan oleh pemerintah. Hal ini tidak bisa dibiarkan, karena akan menyebabkan persoalan baru dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh terutama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perlu adanya upaya

revitalisasi baik dari masyarakat dan pemerintah untuk mengembalikan kembali nilai-nilai Nasionalisme masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat Daya.

Dampak konflik lain yang dirasakan adalah terganggunya perekonomian masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya sehari-hari. Menurut Humphreys (2005: 510) Permasalahan yang terjadi dalam konflik adalah terjadinya pemberontakan yang mengakibatkan terganggunya kegiatan ekonomi, seperti pariwisata, manufaktur dan perindustrian. Dampak tersebut dapat mengganggu berbagai aktivitas masyarakat.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Jayanti (2010:71) menjelaskan akibat konflik yang berkepanjangan selama hampir 30 (tiga puluh) tahun telah menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat Aceh dan mengakibatkan hancurnya dunia pendidikan, hilangnya kesempatan kerja, aktivitas ekonomi rakyat tidak berjalan dengan baik dan berkurangnya nilai-nilai nasionalisme masyarakat Aceh. Selain itu, dampak konflik di Aceh juga menimbulkan luka psikologis yang diderita oleh masyarakat, baik sebagai individu, kelompok dan komunitas.

Aceh Barat Daya merupakan salah satu kabupaten yang terletak di pantai barat provinsi Aceh. Masyarakat di Aceh Barat Daya juga merasakan konflik yang berkepanjangan antara pemerintah RI dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Dampak konflik yang berkepanjangan tersebut membuat kehidupan masyarakat terganggu baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Konflik yang berlangsung selama 30 tahun telah memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara masyarakat Aceh Barat Daya terutama dalam hal nasionalisme. Hal ini ditandai dengan kurangnya partisipasi sebagian masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hasil observasi awal yang telah peneliti lakukan menunjukkan adanya penurunan nilai-nilai nasionalisme di masyarakat Aceh Barat Daya pasca konflik. Nilai-nilai tersebut diantaranya adalah nilai bangga menjadi bangsa Indonesia, nilai kerjasama, nilai harga menghargai, nilai persatuan dan kesatuan, dan nilai rela berkorban.

Perlu adanya upaya dari pemerintah dan masyarakat melalui lembaga formal dan nonformal untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat Aceh Barat Daya

yang bertujuan untuk memperkuat kembali rasa Nasionalisme yang mulai memudar. Upaya ini harus segera dilakukan, agar perdamaian yang sudah terwujud melalui MoU Helsinki dapat bertahan dan tidak ada lagi gejolak konflik di Aceh.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang Revitalisasi Nilai-Nilai Nasionalisme Pasca Konflik Di Masyarakat Aceh Barat Daya (Studi Kasus di Kabupaten Aceh Barat Daya).

B. Identifikasi Masalah

Berikut ini adalah identifikasi masalah nilai-nilai nasionalisme masyarakat Aceh Barat Daya pasca konflik:

1. Konflik yang berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan pemerintah RI berdampak pada berkurangnya nilai-nilai nasionalisme masyarakat Aceh khususnya Aceh Barat Daya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Berkurangnya partisipasi masyarakat Aceh Barat Daya dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Sehingga membuat masyarakat apatis terhadap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
3. Belum maksimalnya upaya pemerintah Aceh Barat Daya dalam merevitalisasi nilai-nilai nasionalisme masyarakat Aceh Barat Daya pasca konflik.
4. Masih tersimpan semangat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Aceh Barat Daya terhadap revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik?
2. Bentuk revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya?
3. Faktor determinan revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik masyarakat Aceh Barat Daya?

4. Faktor penghambat/pendukung revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Aceh Barat Daya terhadap revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik.
2. Mengetahui bentuk-bentuk revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya.
3. Menganalisis faktor-faktor determinan revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya.
4. Menganalisis faktor-faktor penghambat/pendukung revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat untuk masyarakat melalui peningkatan pengetahuan tentang revitalisasi nilai-nilai nasionalisme pasca konflik di masyarakat Aceh Barat Daya serta dapat menjadi masukan kepada pemerintah baik pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan supaya tidak terjadi konflik dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Menjadi masukan kepada para guru terutama guru Pendidikan Kewarganegaraan agar memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, supaya peserta didik memahami makna nasionalisme dan dapat mewujudkan masyarakat yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan Negara Republik Indonesia.